

**PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DALAM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2016-2017**

Oleh: Mawarni

Pembimbing : Dr. Muchid, S.Sos, M. Phil

Email : mawarni040@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Abstract

Public information is information that is produced, stored, managed, sent, and or received by a public body relating to the administration of the state and / or the organizer and administration of other public bodies in accordance with this Law and other information relating to the public interest, as with this research intended to find out How the Role of the Office of Communication and Information in Public Information Publication, the purpose of this study is to describe the Role of the Office of Communication and Information in Public Information Publication. The results of this study are that the role of the Office of Communication and Information of Indragiri Hilir Regency in the Public Information Publication of 2016-2017 is performed less than optimal where in the role indicators namely the coordinator, facilitator, stimulator have been running poorly, which in each of these indicators the government has provided services which is needed by the public in fulfilling public information but is still accompanied by several obstacles and problems.

Keywords: E-Government, Public Relations, Public Information

A. Pendahuluan

Dalam organisasi, Hubungan Masyarakat (*Public relation*) merupakan satu bagian organisasi yang bertanggung jawab mendengarkan dan menampung segala kritik, keluhan ataupun saran dari masyarakat. Humas tidak selalu merupakan alat promosi, tetapi harus dapat menyesuaikan organisasi dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dilanjutkan dengan Undang Undang No 14 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 & 2 dimana dikatakan bahwasanya “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Sejalan dengan hal diatas, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi dan Informasi mencoba untuk memberikan pelayanan publik dengan publikasi informasi publik dengan berbagai tugas pokok dan fungsi yang telah disusun Sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terdapat pada BAB XVI pasal 309 ayat 1 dan 2 Dinas Komikasi, Informasi, Persandian Dan Statistik bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik. Selanjutnya fungsi yang telah disusun yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik
2. Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis

urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa DISKOMINFO adalah penyampai informasi yang mana dalam penyampaian informasi prosesnya berlangsung dua arah timbal balik, pada jalur pertama komunikasi berbentuk penyebaran informasi oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan kepada publik. Pada jalur kedua komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian tanggapan atau opini publik dari pihak publik (masyarakat) kepada pemerintah.

Untuk memberikan publikasi informasi publik kepada masyarakat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir Membentuk pelayanan publik yang dapat langsung diakses oleh masyarakat mengingat sekarang sudah sangat maju dalam penggunaan media elektronik. Pelayanan masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nama Program Pelayanan
Publik Dinas Komunikasi Dan
Informasi Kabupaten Indragiri
Hilir

NO.	Program pelayanan publik	Keterangan
1.	TWITTER	Kurang berjalan
2.	Facebook	Kurang berjalan
3.	Website	Kurang berjalan
4.	Instagram	Cukup berjalan
5.	Siap POL PP	Tidak berjalan
6.	e-Pad	Tidak berjalan
7.	e-Perizinan	Tidak berjalan
8.	Gudang Data	Tidak berjalan
9.	JDIH	Berjalan
10.	Lapor	Tidak berjalan
11.	LPSE	Tidak berjalan
12.	Media Center	Berjalan
13.	SiPAMIL (e-pengaduan),	Tidak berjalan
14.	PPID,	Berjalan

Sumber: data olahan penulis

Dari berbagai Sarana dan Prasarana yang telah dibuat, pemerintah dan masyarakat kurang dapat melakukan pemanfaatan fitur-fitur *online* tersebut. Selain itu juga Selanjutnya menyimak pernyataan dari sekretaris komisi 1 DPRD Inhil, Muammar AR “ Inhil ada sedikit tumpang tindih antara Diskominfo dan Humas”. Ini menjadi sedikit permasalahan yang mana Inhil merupakan salah satu kabupaten yang terjadi peleburan SKPD Diskominfo dan Humas sebelumnya dua instansi tersebut berdiri terpisah, kemudian setelah dibentuk

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka keduanya pun digabungkan.¹

Kemudian selain itu penelitian ini urgen dilakukan akibat perkembangan teknologi dan demokratisasi memasuki era keterbukaan informasi (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) yang berlaku 1 Mei 2010 lalu, yang memberi kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, terutama yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara.

Oleh karena faktor – faktor tersebutlah penulis memilih untuk membuat proposal penelitian dengan judul **Peran Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Publikasi Informasi Publik Tahun 2016-2017.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan masalah Bagaimana Peran Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Publikasi Informasi Publik Tahun 2016-2017?

C. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan Peran Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Publikasi Informasi Publik Tahun 2016-2017.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Lydia Iswandi , Skripsi jurusan ilmu pemerintahan dengan judul Pengembangan *E-Government* Sebagai Upaya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

¹<http://mediacenter.riau.go.id/read/29370/dprd-inhil-sambangi-biro-humas-belajar-publik.html>

Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2016. Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *pengembangan e-government* di Diskominfo Provinsi Riau tahun 2016, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan memperoleh gambaran jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti mendapatkan hasil bahwasanya penerapan *e-government* di Diskominfo Provinsi Riau sudah pada tahap pemantapan dengan terimplementasinya setiap tingkatan-tingkatan strategis penerapan *e-government* sesuai dengan Inpres No 03 Tahun 2003. Maka berdasarkan pemaparan diatas perbedaan yang dapat disimpulkan bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Lydia iswandi dalam ruang lingkupnya yang diteliti merupakan Pengembangan *E-Government* Sebagai Upaya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2016. Adapun lokasi yang diteliti oleh Lydia iswandi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau. Hasil penelitian yang diteliti oleh Lydia Iswandi merujuk pada tahun 2016.²

2. Kerangka Teori

a. Teori Peran

²Lydia Iswandi. (2018). *Pengembangan E-Government Sebagai Upaya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2016*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau

Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Dalam teorinya Biddle & Thomas membagi peristilahan dalam teori peran empat golongan, yaitu istilah yang menyangkut:³

1. Orang-orang mengambil bagian dalam intraksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang dalam perilaku
4. Kaitannya antara orang dan perilaku

Menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴ Scott et al dalam Hermasyah menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu: ⁵

- a. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.

³Sarlito Wirawan Sarwono. (2008). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta. Pt Rajagrafindo Persada. Hal 215

⁴ Soejono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 243

⁵Hermansyah.(2015). *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung*. Jurnal ilmu pemerintahan.vol 3. Hal 3

- c. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Kemudian menurut Sarbin dalam Sarlito beliau menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi-bagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya. Intensitas ini diatur berdasarkan keterlibatan diri (*self*) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakannya.⁶

Menurut Bank Dunia dalam Mudrajat Kuncoro peran atau fungsi pemerintah secara umum itu ada tiga yaitu peran minimal, peran antara, peran aktif. Kemudian peran pemerintah itu pun mencakup yaitu:⁷

1. peran sebagai koordinator
2. peran fasilitator
3. peran stimulator.

⁶Sarlito Wirawan Sarwono. (2008). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta. Pt Rajagrafindo Persada. Hal 219

⁷Mudrajat Kuncoro. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta. Erlangga. Hal 113

Dimana dalam peran koordinator pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerahnya. Kemudian peran sebagai fasilitator pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya, peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Selanjutnya peran sebagai stimulator pemerintah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi pembangunan di daerah.

E. Definisi Konseptual

1. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁸

2. Publikasi

Menurut Iriantara publisitas atau publikasi dibedakan menjadi dua jenis yakni publisitas umum/luas dan khusus/sempit, Publisitas umum mencakup semua informasi di media massa yang dicari dan ditulis wartawan. Berita dan informasi tersebut bukan atas inisiatif PR

⁸ Soejono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 243

(bukan dikirim PR), melainkan wartawan sendiri yang mencari dan menulisnya. Sedangkan publisitas sempit terbatas pada informasi tentang kegiatan organisasi yang secara sengaja ditulis dan dikirimkan untuk diliput/dimuat media. Merujuk pada Iriantara di lapangan hanya PR yang mampu mengidentifikasi mana publisitas yang bersifat umum dan khusus hanya PR dan media.⁹ Khalayak tidak dapat membedakan karena yang dihadirkan kepada para khalayak sudah dalam bentuk berita atau artikel yang dimuat di media massa.

3. Informasi publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ayat 1 dan 2 menjelaskan Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang

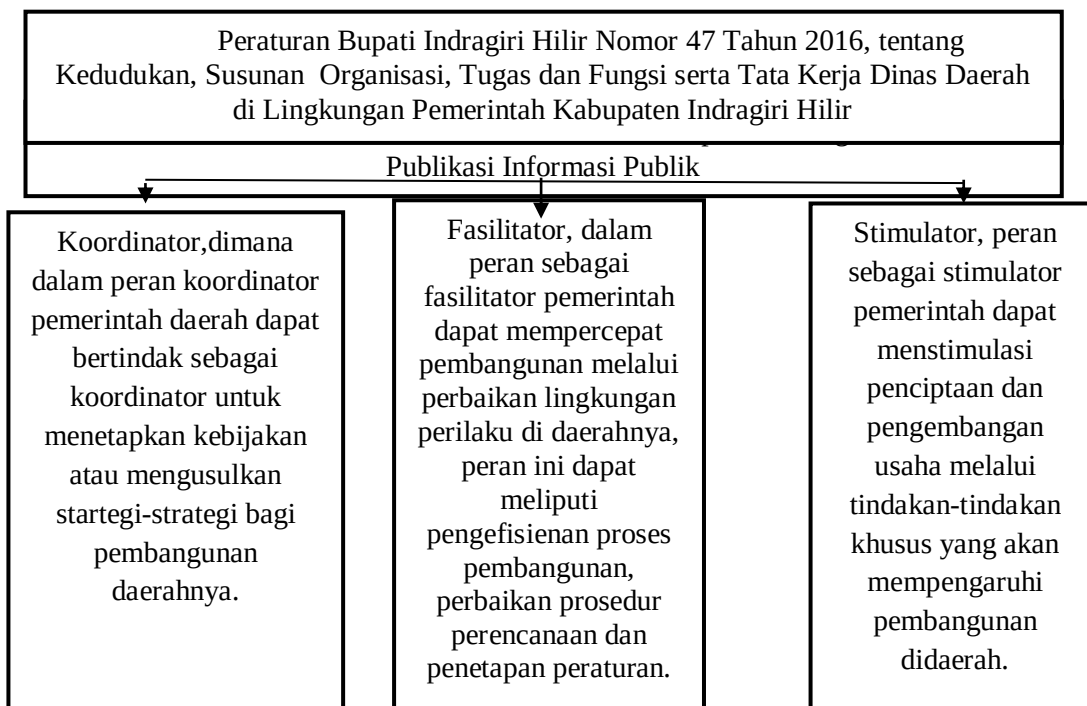
berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁰

⁹ Iriantara, Yosai. (2008). *Media Relations ; Konsep, Pendekatan Praktik*. Bandung. Simbiosis. Hal 62

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

F. Kerangka Berpikir

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, jenis deskriptif. Metode kualitatif yang akan dilakukan ini tentang Peran Dinas Komunikasi Dan Informasi Dalam Publikasi Informasi Publik. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkompeten untuuk memberikan informasi yang berjumlah 8 orang. Adapun seluruh informan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2.1 Informan Penelitian

N O	NAMA	JABATAN	JUM LAH
1.	Drs.H.M .	Kepala Dinas	1

penelitian yang dilakukan oleh

	THAHE R, MM		
2.	SLAME T RIADI SE	Kepala Bidang Pengemban gan, Pengelolaan , Dan Penyelengg araan Aplikasi	1
3.	Hj. SITI KHADI JAH, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaia n	1
4.	DEDI ALEXA NDER S.IP	Kepala sub bagian dokumentas i dan publikasi	1
5.	M.NUR INDRA	Kasubbag Perencanaan	1

	TNO, S.Sos	,Evaluasi dan Pelaporan	
6.	RISNO MUSRI	Staff Perencanaan	1
7.	FATMA WATI	Masyarakat	1
8.	SITI	Masyarakat	1
	Jumlah		8

Sumber: Data olahan penulis, 2019

1. Teknik Analisa data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi terkait dengan masalah Peran Dinas Komunikasi Dan Informasi Dalam Publikasi Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka penulis memilihnya menurut jenis dan data yang diperoleh sesuai dengan fenomena sosial untuk dianalisa dan disimpulkan berdasarkan teori yang ada.

H. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir dalam Publikasi Informasi Publik Tahun 2016-2017.

Dalam melakukan publikasi informasi publik, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Publik melakukan upaya dengan beberapa indikator yaitu:

A. Koordinator

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui optimalisasi peran di bidang administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi

informasi. Dalam bidang pemerintahan, masyarakat luas menuntut pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, berkeadilan dan mampu menegakkan hukum secara adil. Lebih dari itu, masyarakat juga menuntut ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses kebijakan sehingga kebijakan publik benar-benar mengabdikan kepada kepentingannya.

Dalam upaya yang dilakukan pemerintah membentuk sebuah publikasi informasi publik dengan indikator koordinator, pemerintah membentuk PPID. Tugas penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing pejabat struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. PPID bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik terkait tugas dan fungsi masing-masing unit.

Permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID ditangani oleh masing-masing PPID sesuai dengan bidang penguasaannya. Sebagai contoh, permohonan informasi tentang rencana kerja anggaran ditangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, informasi tentang pagu dana dan realisasi anggaran oleh dinas komunikasi dan informasi, dan sebagainya. Untuk itu,

diperlukan sinergi yang optimal antar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik. Sementara itu, apabila Pemohon informasi tidak mengetahui PPID mana yang harus dituju saat meminta informasi maka permohonan informasi dapat disampaikan melalui Sekretaris yang nantinya permohonan tersebut akan diteruskan kepada PPID terkait di lingkungan dinas komunikasi dan informasi untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

2. Fasilitator

Dalam peran sebagai fasilitator pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya, peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Sebagai mana scot et al dalam Hermansyah menyebutkan bahwa peran itu memiliki arti penting yang bersifat impersonal dimana peran akan menentukan harapan yang ada.¹¹

Sebagaimana penjelasan dari kepala bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan M.Nur Indratno, S.Sos, upaya yang telah dilakukan untuk dapat mengoptimalkan peran Dinas komunikasi dan informasi dalam publikasi informasi publik ialah sebagai berikut:

- a) Melakukan Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

- b) Melakukan Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- c) Mengadakan Program Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi, Cakupan Pengembangan Sistem E-Government

- d) Mengadakan Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik, Jumlah pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik.

3. Stimulator

Stimulator ialah upaya pemerintah menjalankan peran dimana sebagai stimulator pemerintah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi pembangunan di daerah. Media *online* dinilai sebagai sarana yang lebih efisien dalam membangun relasi dengan masyarakat bagi pemerintah. Maka dari itu pemerintah semakin mendorong pemanfaatan media *online*. Pada pemerintahan demokratis seperti Indonesia ini, dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, ketersediaan kanal komunikasi yang menghubungkan rakyat dengan penyelenggara Negara. Kehadiran media sosial kini telah membentuk interaksi yang baru antara pemerintah dan masyarakat. Kanal komunikasi ini penting sebab pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang berkewajiban untuk mendengarkan aspirasi warganya, sekaligus bertanggung jawab langsung pada warganya. Kanal terbuka akan memungkinkan pengawasan secara langsung, yang juga merupakan poin penting di

¹¹ Hermansyah.(2015). *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung*. Jurnal ilmu pemerintahan.vol 3. Hal 3

dalam demokrasi. Media sosial, merupakan salah satu jawaban efisien untuk sarana atau kanal komunikasi yang terbuka yang dibutuhkan, dalam hal ini DISKOMINFO telah membuat pelayanan masyarakat seperti *facebook, twitter, website, instagram, Siap POL PP, e-Pad, e-Perizinan, Gudang Data, Hotspot Area, JDIH, Lapor, LPSE, Media Center, PPID, SiPAMIL (e-pengaduan)* guna menunjang pembangunan daerah.

2. Faktor Penghambat Peran Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Publikasi Informasi Publik Tahun 2016-2017

Penerapan Peran Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Publikasi Informasi Publik memiliki beberapa hambatan yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor penghambat tersebut yaitu:

a. Ketidaksiapan Bagian Humas dan Protokol Dalam Menyediakan Permintaan Informasi.

Jika dicermati lebih jauh, intimnya hubungan kerjasama antara pemerintah dan media mampu mempengaruhi agenda setting yang dijalankan oleh media. dari Mc Comb dan Donald L.Shaw dalam Ismail Sam Giu berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap isu itu penting karena media menganggap isu itu penting juga.¹² Dengan keadaan keterbukaan

informasi saat ini tentunya informasi itu adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun dalam pemenuhan informasi tersebut tentunya pemerintah mengalami beberapa kendala. Hal ini dijelaskan oleh Dedi Alexander yang mana beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pemanfaatan media online tentu sangat di utamakan ketersediaan informasi itu ada, dan apapun yang di search seharusnya tersedia. Namun dalam hal ini penyediaan informasi tersebut terkadang belum ada dalam form pelayanan. Banyak peneliti yang membutuhkan data harus kembali ke manual. Mereka juga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data dan setiap kantor tidak semua yang memiliki arsip yang lengkap dan rapi.” (Wawancara 26 Februari 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya dinas komunikasi dan informasi masih belum dapat memberikan publikasi informasi publik kepada masyarakat dimana masyarakat masih lagi terkendala ketika membutuhkan suatu data dikarenakan data tersebut tidak tersedia dalam form pelayanan informasi publik.

b. Ketidaktersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

¹² Ismail Sam Giu. Dkk. (2019). *Pemberdayaan Humas Skpd Dalam Menunjang Empat Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Hal 8

Melalui Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) pada Dinas Komunikasi Dan Informasi melakukan penyaringan berita atau informasi kegiatan pemerintah dan informasi atau berita yang terpilih kemudian ditampilkan pada *website* resmi pemerintah serta juga pada aplikasi android. Pada media komunikasi *online* yang dipergunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi tersebut, masyarakat dapat bebas mengakses informasi atau berita Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Namun dalam hal ini masyarakat masih memiliki kendala seperti yang dijelaskan dalam wawancara oleh peneliti.

Kurangnya ketersediaan data dan SDM handal telah dijelaskan oleh Risno Musri, yang mana beliau mengatakan bahwa :

“Dari tahun ke tahun kemajuan ada, namun yang signifikan belum ada. Seperti dulu website dulu yang masih kosong, sekarang sudah terisi dengan berita dan lainnya, namun masyarakat kebanyakan membutuhkan data yang komperensif dan seharusnya dalam penerapan E-Government detail dengan data yang akurat. Hal ini juga sebenarnya ya terkendala dengan kurangnya SDM handal dalam pengelolaan informasi publik tersebut (Wawancara tanggal 21 Desember 2018)”

Penyediaan informasi yang sangat dicari oleh masyarakat seperti

publikasi informasi publik dan lain sebagainya masih belum optimal dalam pelaksanaan kuantitas maupun kualitasnya yang dipengaruhi oleh SDM yng kurang handal. Sehingga hal ini dapat diartikan bahwasanya masih ada kendala dan hambatan yang dialami oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan peran Dinas Komunikasi dan Informasi dalam publikasi informasi publik.

I. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Peran Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Publikasi Informasi Publik Tahun 2016-2017 telah dilakukan dengan kurang optimal dimana dalam indikator peran yaitu koordinator, stimulator dan fasilitator tidak berjalan dengan baik dikarenakan publikasi informasi yang dilakukan masih banyak terkendala oleh berbagai permasalahan.

2. Saran

a. Bagi pemerintah sebaiknya melakukan pemerataan pembangunan jaringan internet, agar semua masyarakat dapat mengakses internet dimana dan kapan pun saja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Selain itu dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat sampai ke pelosok desa. Bagi masyarakat sebaiknya semakin aktif lagi dalam menggunakan berbagai fitur pelayanan masyarakat yang telah diberi oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat juga

berpartisipasi dalam pengembangan dan juga memajukan daerah khususnya Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Iriantara, Yosol. (2008). *Media Relations; Konsep, Pendekatan Praktik*. Bandung. Simbiosis
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta. Erlangga
- Soekanto, Soejono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2008). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta. Pt Rajagrafindo Persada

Artikel Ilmiah :

- Hermansyah. (2015). *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung*. Jurnal ilmu pemerintahan. vol 3
- Ismail Sam Giu. Dkk. (2019). *Pemberdayaan Humas Skpd Dalam Menunjang Empat Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo*
- Lydia Iswandi. (2018). *Pengembangan E-Government Sebagai Upaya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2016*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau

Dasar hukum dan sumber lainnya:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik